



PENGAJUAN PENSIUN SUKAMTO MASIH DICERMATI

Kepala Kesbang Diisi Pelaksana Tugas

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemkot Yogyakarta masih mencermati status dan pengajuan pensiun dini status pegawai negeri sipil Sukamto yang kini mendekam di Lapas Wirogunan terkait korupsi dana hibah KONI. Untuk sementara jabatan Kepala Kantor Kesatuan Kebangsaan (Kesbang) yang sebelumnya dijabat Sukamto, diisi pelaksana tugas (Plt).

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi menyatakan, sudah menggelar rapat terkait status Sukamto dan pensiun dini yang diajukan. Namun belum diputuskan karena pemkot belum mendapat data-data formal hasil keputusan kasasi. Setelah mendapat data itu, pemkot akan melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk tindak lanjut terhadap status Sukamto.

"Karena apa yang akan kita putuskan

berdasarkan data-data formal yang kita dapat. Selama ini kita belum terima data-data formal itu. Kita nunggu itu dulu baru koordinasi dengan KASN dan baru kemudian buat putusan," kata Heroe, Minggu (24/6).

Seperti diketahui Kepala Kesbang Yogyakarta Sukamto dieksekusi Kejari setempat pada Rabu (30/5) silam atas kasus korupsi dana hibah KONI Kota Yogyakarta tahun 2013. Beberapa hari sebelum dieksekusi, Sukamto sudah mengajukan surat pensiun dini sebagai PNS.

Terkait pengajuan pensiun dini akan diproses atau dihentikan sementara internal Pemkot Yogyakarta juga masih mengkaji. Dia menjelaskan ada aturan bahwa ASN yang berperkara, kalau pensiun dini diajukan ketika sudah mulai ada tindakan hukum dari aparat, maka

pengajuan tidak bisa diproses atau gugur. Sedangkan jika pengajuan pensiun dini sebelum ada penindakan dari aparat, maka masih dapat diproses pengajuan pensiun dini.

"Dalam konteks ini Pak Kamto mengajukan permohonan diri pensiun diri beberapa hari sebelum tereksekusi, sehingga ada kemungkinan besar untuk tidak dikabulkan permohonannya," terangnya.

Namun, lanjutnya, jika Pak Kamto mau melakukan proses hukum dengan peninjauan kembali (PK) ada kemungkinan mendapat haknya. Hal itu apabila dalam isi membebaskan Sukamto dan memberikan kompilasi untuk mengembalikan hak-hak. "Maka Pak Kamto bisa mengajukan untuk memperoleh hak-haknya kembali," ujar Heroe.

Selama menunggu keputusan status tersebut, jabatan Kepala Kesbang sementara diisi oleh Plt. Langkah itu agar

program kegiatan yang telah direncanakan Kesbang di Kota Yogyakarta tetap bisa berjalan secara optimal. "Sementara jabatan Kesbang diisi pelaksana tugasnya adalah Kepala Tapem dan Kesra," tambahnya.

Sebelumnya Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko mendesak kepala daerah segera memutuskan status jabatan Kepala Kesbang Kota Yogyakarta dengan menunjuk pejabat definitif atau Plt karena pejabat sebelumnya tersangkut hukum. Langkah itu agar program kegiatan yang direncanakan di Kesbang bisa berjalan optimal.

"Perlu ada penunjukan pejabat definitif atau Plt untuk mengisi posisi kepala Kesbang, agar program di Kesbang yang sudah dijadwalkan tidak keteteran," tandas Sujanarko. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BKPP			

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005